

**DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN BONE KABUPATEN MUNA**

Oleh:

**Yuni Sari**

(Mahasiswa S1 Jurusan PPKn FKIP UHO)

**Sundi Komba**

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

**Nerlin**

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari,  
93232 Sulawesi Tenggara, Indonesia*

**Abstrak:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemekaran kecamatan Bone. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah ketua dan sekretaris camat Bone Kancitala 2 orang, Tokoh masyarakat 1 orang, sekretaris panitia pemekaran pada wilayah Kecamatan Bone Kancitala 1 orang, Kepala Desa Bone Kancitala 1 orang, birokraksi pemerintahan daerah kabupaten 1 orang, Kepala Dinas Pendidikan Bone Kancitala 1 orang, Mantri kesehatan 1 orang, dan 5 kepala keluarga (KK). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah adalah peneliti kepustakaan dan peneliti Lapangan yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif pemekaran kecamatan Bone yaitu: (1) aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan kecamatan dan sarana dan prasarana yang baik dan lancar, (2) memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai hal dalam aspek pendidikan, kesehatan, pemerintahan kecamatan, ekonomi, dan sarana dan prasarana, (3) pemerintah dengan mudah mengkordinasikan dan menggerakkan partisipasi masyarakat karena jumlah penduduk tidak sepadat sebelum pemekaran sedangkan sebelum pemekaran Kecamatan Bone yaitu: 1) adanya pembagian asset; 2) terjadinya penyempitan lahan; 3) tidak ada ganti rugi tanah; 4) adanya tindakan diskriminasi terhadap masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah ada dampak positif dan dampak negatif dari Dampak Pemekaran Kecamatan Bone. Dampak positif tersebut harus tetap dipertahankan guna untuk memberikan terciptanya kondisi pembangunan yang efisien sedangkan dampak negatif dari pemekaran harus diminimalisir agar tidak muncul masalah yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Dampak, Pemekaran, Kecamatan.

**PENDAHULUAN**

Pembangunan yang digalakan oleh pemerintah merupakan wujud konkrit dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan dalam pembukaan UUD 1945 yang membentuk pemerintahan daerah Negara Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di daerah peningkatan terhadap percepatan pembangunan daerah dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik. Kecamatan Bone merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Muna, Kecamatan Bone memiliki lahan pertanian yang luas dan masyarakatnya memiliki jiwa wirausaha, dan begitu masyarakatnya yang berdomisili di wilayah kecamatan tersebut dan akan semakin banyak ketersediaan

sarana yang dilakukan oleh pemerintah seperti: pendidikan, kesehatan, pemerintah kecamatan, ekonomi dan sarana prasarana. Sebelum adanya pemekaran Kecamatan Bone belum tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum seperti kantor lurah, gedung sekolah yang masih kurang, pelayanan kesehatan, sarana air bersih berupa bunker dari PDAM, jaringan listrik, dan jalan tani. Kecamatan Bone mekar dari Kecamatan Marobo, pada awalnya terbentuknya Kecamatan Bone memiliki kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, dimana proses pelayanannya kepada masyarakat dilakukan di daerah lain. Kecamatan Bone sudah kurang lebih 8 tahun dimekarkan dari Kecamatan Marobo dan telah melaksanakan pembangunan dari berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, sarana pemerintahan, ekonomi dan sarana prasarana. Dengan adanya pemekaran Kecamatan Bone tersebut maka Kecamatan Bone terbagi atas beberapa desa yaitu, Desa Oelongko, Bone Tondo, Bone Lolibu, Matombura, dan Desa Bone Kancitala itu sendiri. Mencermati realita perkembangan dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat Kecamatan Bone diantaranya dampak positif yaitu dapat melancarkan pengurusan diberbagai di aspek pendidikan, kesehatan, pemerintah kecamatan, ekonomi serta sarana dan prasarana, peralatan publik dilakukan secara maksimal sampai memenuhi kebutuhan atau kepentingan secara menyeluruh.

Pemahaman terhadap konsep otonomi daerah menjadi sangat penting karena masih dijumpai kesalahan pemahaman terhadap konsep otonomi daerah oleh berbagai kalangan, termasuk unsur pemerintahan itu sendiri yakni birokrasi. Kajian pustaka untuk menguraikan konsep otonomi daerah sangat berkaitan erat dan berhubungan dengan pemekaran daerah atau pemekaran kecamatan. Disamping itu juga, dalam teori pemerintahan daerah, berdasarkan alasan dan pertimbangan administrasi seperti efisien dan efektivitas sejatinya pemekaran daerah bukanlah hal yang diharamkan atau ditabuk. Pemekaran tujuannya tidak lain adalah untuk mendekatkan lokus pengambilan keputusan pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Menurut Rondeneli (Dwiyanto, 2003) mengemukakan bahwa Desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dalam perencanaan pemerintah. Pendapat lain yang mengaitkan desentralisasi dengan kekuasaan dikemukakan oleh Smith (Dwiyanto, 2003) mengemukakan bahwa desentralisasi sebagai pola hubungan kekuasaan diberbagai tingkat pemerintah. Oleh karena itu, desentralisasi yang dalam realisasinya diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan yang menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pemekaran merupakan pemecahan atau pemisahan dari suatu daerah dengan wilayah induknya sebagai induknya sebagai daerah otonomi untuk dapat berdiri sendiri dimana syarat ketentuan pembentukan daerah diatur dalam peraturan pemerintah. Pemekaran daerah era reformasi yang dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang problematika yang dihadapinya secara alternatif pemecahan masal. Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi dengan interaksi yang lebih insentif antara masyarakat dan pemerintahan daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibanya secara lebih baik sebagai

warga negara. Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintahan daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Semakin meningkatnya mobilisasi masyarakat, perubahan penduduk dan meningkatnya pembangunan maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam aspek pemerintahan dan pembangunan perlu dapat diperhatikan yang utama salah satu tindakan pemekaran. Menurut Widjaja, (2005) Pemekaran merupakan salah satu organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1999) mengemukakan bahwa pemekaran dapat membangun dan meningkatkan suasana kekeluargaan yang harmonis dan pergaulan antar warga bertambah serta dengan jumlah penduduk yang proporsional dapat membangun kehidupan masyarakat yang berpartisipasi terhadap pembangunan. Berdasarkan pendapat di atas bahwa pemekaran ternyata belum sepenuhnya mampu membawa masyarakat dalam kehidupan yang lebih baik karena masih adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah terjadinya pemekaran. Dampak pemekaran Kecamatan Bone Menurut Pusat Kajian dan Diklat Aparatur 1 (PKP2A1) Lembaga Administrasi Negara (2004) di rasakan dimensi kehidupan sebagai berikut.

- a. Aspek pendidikan; dampak positifnya yaitu dimana ketersediaan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan mengalami peningkatan yang memadai, sarana fasilitas sekolah untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan aktivitas keseharian dan tenaga atau pelayanan mengajar kepada pendidik.
- b. Aspek kesehatan; dampak positifnya yaitu dimana tersedianya tenaga pelayanan kesehatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena pelayanan yang diberikan bersifat cepat, fasilitas kesehatan yang memadai, serta tenaga atau pelayanan kesehatan yang cukup memadai pada setiap desa/kelurahan.
- c. Aspek pemerintahan kecamatan; dampak positifnya yaitu dimana tersedianya tenaga pelayanan administrasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena pelayanan yang diberikan sangat cepat dan tepat, memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi, pemberian pelayanan yang nyaman, tempat pelayanan (kantor kecamatan) dekat dengan pemukiman penduduk dan mudah dijangkau, tersedianya fasilitas yang memadai serta tenaga pelayanan administrasi juga yang sangat memadai.
- d. Aspek ekonomi; dampak positifnya yaitu dimana terjadinya kelancaran kegiatan ekonomi karena didukung sarana dan prasarana, terbukanya akses jalan yang baik yang menghubungkan setiap desa sekecamatan, tempat pemasaran yang baik dan mudah dijangkau dan tersedianya fasilitas transportasi.
- e. Sarana dan prasarana; dampak positifnya yaitu terjadinya peningkatan jumlah sarana dan prasarana umum sehingga dapat menunjang kehidupan sosial masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan Penelitian penelitian ini terdiri dari 12 orang, ketua dan sekretaris Camat Bone 2 orang, Tokoh masyarakat 1 orang, sekretaris panitia pemekaran pada wilayah Kecamatan Bone 1 orang, Kepala Desa Bone 1 orang, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Bone 1 orang, kepala mantri kesehatan 1 orang dan 5 orang kepala keluarga (KK) beserta istrinya. Jenis data dalam penelitian ini adalah: a) Data Primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara yakni menyangkut Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pemekaran Kecamatan Bone; dan b) Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari beberapa literatur dan yang bersumber dari instansi dengan obyek penelitian yakni, data dampak pemekaran kecamatan bone kabupaten muna. Teknik pengumpulan yang data dilakukan yaitu: 1) Studi kepustakaan (*library study*) yaitu, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur, laporan-laporan dan sumber bacaan lainya dan masalah yang akan diteliti; dan 2) Studi lapangan (*field study*) yaitu, metode pengumpulan data yang langsung didapatkan dari lapangan dengan meneliti fakta-fakta yang ada hubunganya dengan objek peneliti mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pemekaran Kecamatan Bone dengan menggunakan metode Observasi (pengamatan), Wawancara (*interview*) dan Dokumentasi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu: 1) Reduksi Data (*Data Reduction*), dimana data yang telah dikumpulkan dilapangan dianalisis kembali dan memilih hal-hal yang pokok, merangkum, dan menfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai Dampak Pemekaran Kecamatan Bone Kabupaten Muna; 2) Penyajian Data (*Data Display*) dimana penyajian data dalam peneliti ini dalam bentuk uraian singkat dan table atau bagan; dan 3) Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing/verivication*), dimana peneliti menyimpulkan data dan menariknya sebagai kesimpulan yang sah dengan data yang kredibel berdasarkan bukti-bukti pada lapangan dalam hal ini Dampak Pemekaran Kecamatan Bone Kabupaten Muna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Positif

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan adalah yang diterima dan dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Bone setelah adanya atau dimekarkan Kecamatan Bone secara defenitif. Dengan adanya pemekaran kecamatan tanggapan masyarakat didalam aspek pendidikan semakin dirasakan oleh masyarakat setempat, seperti peningkatan fasilitas umum (sosial) kepada masyarakat dalam hal ini merupakan program pembangunan fasilitas umum yaitu: kesehatan, pendidikan, pemerintahan kecamatan serta perkembangan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut untuk lebih jelasnya tentang dampak positif dari pemekaran Kecamatan Bone diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting terhadap perkembangan diri setiap individu, oleh karna itu kualitas pendidikan harus

semakin ditingkatkan dalam menciptakan individu-individu yang bermutu sehingga mampu dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang baik dan sesuai dengan harapan peserta didik dalam pendidikan. Kesempatan mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara. Olehnya itu ketersediaan sarana pendidikan adalah hak mutlak di suatu daerah guna untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia khususnya pendidikan tingkat dasar dan menengah di Kecamatan Bone yatu, Sarana Pendidikan dan tenaga Pelayanan Pengajar pada Sekolah di Kecamatan Bone

## **2. Aspek kesehatan**

Kesehatan merupakan factor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu bangsa dan upaya membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera dan perlu didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, sebelum pemekaran, sarana kesehatan di Kecamatan Bone tidak terdapat sama sekali, namun setelah beberapa tahun dimekarkan telah memberikan dampak yang cukup positif yaitu dengan terbangunya beberapa sarana. Untuk mengetahui tentang dampak positif dari represi masyarakat dampak pemekaran Kecamatan Bone, tentang sarana aspek kesehatan kepada masyarakat yaitu, sarana kesehatan dan pelayanan kesehatan pada masyarakat kecamatan bone. Dapat diketahui bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan membawa salah satu dampak positif yaitu pemerataan pelayanan tenaga kesehatan dimana adanya pembangunan pelayanan tenaga kesehatan yang dibutuhkan masyarakat berjalan dengan baik.

## **3. Administrasi Pemerintahan Kecamatan**

Sarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sarana fisik yang menunjang penyelenggaraan pemerintah kecamatan terutama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung melalui upaya pengadiln sarana dan prasarana pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu: Fasilitas Aspek Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Tenaga Pelayanan Aspek Administrasi Pada Pemerintahan Kecamatan. Dengan demikian, setelah dimekarkan pemekaran Kecamatan Bone sarana pemerintahan Kecamatan menunjukan ada kemajuan pada setiap Desa diantaranya yaitu, Kantor Camat Kecamatan ditempatkan di Desa Bone kancitala, kemudian Desa Matombura dibangun 1 unit balai desa, Bone tondo 1 unit balai desa, Bone lolibu 1 unit balai desa, Oelongko 1 unit Balai desa, dan Desa Bone Kancitala 1unit balai Desa. Kini sebelum pemekaran sarana pemerintahan masih kurang yang digunakan masyarakat.

## **4. Aspek Ekonomi**

Dalam aspek ekonomi dan sosial setiap usaha yang dijalankan, tentu akan memberikan dampak Bagi masyarakat yang berinvestasi akan memberi peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan yang paling mendasar yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Bone.dan daerah yang memiliki sumber daya alam. Secara umum dampak positif dari aspek ekonomi adalah adanya sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, listrik, pasar dan sarana prasarana lainnya.

Pemekaran Kecamatan Bone sangat membantu kelancaran dan peningkatan perkonomian masyarakat setempat, hal ini ditandai berdirinya pembagunan, perkembangan lainya sebagai dampak pemekaran Kecamatan Bone adalah dibukanya jalan transportasi secara langsung, ketersediaan ruang pertemuan/balai desa juga mengalami peningkatan yaitu setiap desa memiliki minimal satu ruang

pertemuan/balai desa. Hal ini volume pertemuan yang terfokus pada penyuluhan perkebunan, pendidikan dan kesehatan, sehingga lokasi pertemuan disamping kantor juga dibangun ditengah-tengah pemukiman padat lainnya. Sedangkan pendapatan masyarakat kecamatan bone perbulan adalah sebagian besar sumber pendapatan masyarakatnya di bidang pertanian, Dalam hal ini ditunjang mendukung kegiatan dan mengembangkan pertanian dan perkebunan. Pendapatan masyarakat menunjukan dampak positif karena telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang signifikan sesudah pemekaran Kecamatan.

### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

Pengembangan atau pembangunan sarana dan prasarana umum merupakan hal yang sangat penting untuk dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat termasuk sarana dan prasarana dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan aktivitas keseharian. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Bone perlu dilakukan terutama bidang infrastruktur jalan yang apabila musim penghujan tiba jalan tersebut hampir tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Sehingga hal itulah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Setelah dengan adanya pemekaran Kecamatan perkembangan atau pembangunan pemerintah mengadakan suatu bentuk kegiatan yang menghidupkan kerja sama dan bahu membahu untuk membangun Kecamatan Bone. Hal ini pembangunan Kecamatan Bone juga meningkatkan kepuasan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kantor lurah, agama dan pembangunan lainnya.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa peranan pemerintahan Kecamatan Bone telah memberikan fasilitas Seperti aspek pendidikan, kesehatan, sarana pemerintahan, ekonomi, dan sarana dan prasarana. Disamping itu didukung pendapat dari effendi dalam widodo (2001:136) mengemukakan bahwa birokrasi harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih profesional dan membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri arah pembangunan kualitas manusia adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang kemungkinan yang setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.

### **Dampak Negatif**

Selain dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Bone dengan dibangunnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terjadinya penyempitan lahan, tidak ada ganti rugi tanah, adanya pembagian asset, penentuan biaya yang tidak wajar dalam penentuan pembangunan dan adanya tindakan diskriminasi. Untuk lebih jelasnya tentang dampak negatif dari pemekaran Kecamatan Bone diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Terjadinya Penyempitan Lahan**

Berdasarkan hasil penelitian, dampak negatif suatu pemekaran Kecamatan Bone adalah terjadinya penyempitan lahan yang disebabkan oleh aktifitas pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak menutup kemungkinan lahan-lahan atau tanah-tanah rakyat serta perumahan rakyat ikut dikorbankan demi untuk kelancaran kegiatan pembangunan.

## 2. Adanya Pembagian Aset

Masalah lain yang muncul setelah pemekaran Kecamatan Bone adalah terjadinya pembagian aset antara kecamatan sebelumnya dengan kecamatan yang baru dimekarkan, permasalahan yang sering dijadikan polemik adalah pelaksanaan penegasan dan penetapan batas wilayah dimulai dari unit desa/kelurahan dengan kelurahan berupa batas kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian, sebelum pemekaran kecamatan belum terjadinya pembagian aset antara kecamatan sebelumnya dan kecamatan baru, aset yang dimaksud adalah pembangunan yang ada di kecamatan baru bagian aset dari kecamatan sebelumnya seperti: pembangun sekolah SD, dan SMP ini merupakan aset dari kecamatan Marobo sebelum dimekarkan Kecamatan Bone. Hal ini pemerintah Kecamatan Bone menyediakan fasilitas umum.

## 3. Tidak Ada Ganti Rugi Tanah

Selain dampak terjadinya penyempitan lahan, pembagian aset dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemekaran kecamatan disuatu daerah adalah tidak ada ganti rugi tanah. Permasalahan yang muncul setelah pemekaran Khususnya pemekaran Kecamatan Bone yaitu dimanfaatkannya tanah-tanah warga untuk kegiatan pembangunan namun tidak ada ganti rugi tanah. Berdasarkan hasil penelitian, sebelum adanya pemekaran lahan-lahan masyarakat bebas menggunakan lahan mereka, namun ternyata pemekaran kecamatan Bone ternyata berdampak negative seperti pemanfaatan lahan perkebunan yang tidak ada ganti rugi tanah. Masyarakat dilarang berkebun sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka, akhirnya mereka harus berkebun ditempat pengunungan yang jauh dari pemukiman.

## 4. Adanya Tindakan Diskriminasi Terhadap Masyarakat

Permasalahan lain disamping diatas timbul setelah pemekaran Kecamatan Bone adalah adanya tindakan diskriminasi terhadap masyarakat. Dampak tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Bone dalam hal ini dikomersialkannya dengan pemerintah, adanya pembgian aset terjadinya penyempitan lahan, tidak ada ganti rugi tanah, penentuan biaya yang tidak wajar dalam penentuan pelayanan pembangunan dan adanya tindakan diskriminasi. Dalam hubungannya dengan dampak negatif kelima aspek dan dampak negative diatas sangat menonjol dirasakan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Dampak pemekaran Kecamatan Bone Kabupaten Muna dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak positif pemekaran Kecamatan Bone yaitu: (1) aspek pendidikan, kesehatan, pemerintahan kecamatan, ekonomi, dan sarana dan prasarana yang baik dan lancar (2) memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai hal dalam aspek pendidikan, kesehatan, pemerintahan kecamatan, ekonomi dan sarana/prasarana, (3) pemerintah dengan mudah mengkordinasikan dan menggerakkan partisipasi masyarakat karena jumlah penduduk tidak sepadat sebelum pemekaran.
2. Dampak negatif pemekaran Kecamatan Bone yaitu: (1) terjadinya penyempitan lahan yang disebabkan pada pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah tidak memperhatikan aspek-aspek penting penunjang kehidupan sehari-

hari warga Kecamatan Bone (2) terjadinya pembagian aset yang berakibat pada timbulnya konflik antara warga kecamatan yang lama dengan warga pemekaran kecamatan (3) tanah milik warga yang dijadikan lokasi atau sarana pembangunan tidak diberika ganti kerugian, dan (4) adanya tindakan diskriminasi kepada warga yang dilakukan kepengurusan administrasi (pembuatan KTP).

#### **Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Muna dan lebih khusus Kepada pemerintah Kecamatan Bone agar sekiranya perencanaan pola pembangunan dilakukan dengan berbasis kepada pembangunan pro rakyat atau lebih memperhatikan kepentingan masyarakat Kabupaten Muna.
2. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Muna agar sekiranya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam mengabaikan tindakan diskriminasi dan ketidakadilan.
3. Diharapkan kepada seluruh instasi pemerintah lebih khusus pemerintah Kabupaten Muna yang meliputi pemerintahan pada aspek pendidikan, kesehatan, pemerintah kecamatan, ekonomi, serta sarana dan prasarana agar kiranya lebih meningkat kinerjanya dan lebih optimal lagi dalam kemampuan profesionalitas disiplin kerja dan kualitas kinerja agar dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap mutuh dalam pembangunan sarana dan prasarana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwiyanto, Agus. 2003. *Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta: Pusat studi Kependidikan dan Kebijakan UGM
- Sartono, Kartodirjo.1999. *Demokrasi dan Kehidupan Masyarakat dipedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Widjaja, Haw. 2006. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Pusat Kajian dan Diklat Aparatur 1 (PKP2A1) Lembaga Administrasi Negara. 2004.